

**PENGUNAAN CEK DAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
KASUS PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN Tka.)**



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dan meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

MUHAMMAD AZHAR AKBAR

NIM : 10500113261

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azhar Akbar
NIM : 10500113261
Tempat/Tgl.Lahir : Toli-Toli, 29 September 1994
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Batua Raya IV Perm. BRI Blok. D No. 9
Judul : Penggunaan Cek dan Bilyet Giro dalam kasus Pidana Penipuan (Studi
Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Tka)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata,

Penyusun,

Muhammad Azhar Akbar

NIM: 10500113261

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 68/Pid,B/2016/PN.Tka)” yang disusun oleh Muhammad Azhar Akbar NIM: 10500113261, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Pidana Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 M, bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar.

Makassar, 28 Maret 2018 M
26 Jumadil Akhir 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Fadli Andi Natsif, M.H	(.....)
Munaqisy II	: Ashar Sinilele, S.H.,M.H	(.....)
Pembimbing I	: Drs. H. Munir Salim, S.H.,M.H	(.....)
Pembimbing II	: Ashabul Kahpi, S.Ag.,M.H	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan fakultas syariah & hukum,
Uin alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 1 003

KATABPENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb.

ما.جمعينا صحبه و ملا على و, لمرسلين و اءيا-لأنبا فشرأ على م لاللسوا ة لصلالوا ين لعالما رب لالحما
للبع

Rasa syukur yang sangat mendalam penyusun panjatkan kehadiran Allah swt. atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penggunaan Cek Dan Bilyet Giro Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor. 68/Pid.B/2016/PN.Tka)” sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah paa baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Saya menyadari bahwa, tidaklah mudah untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan doa dari berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih yang teristimewa untuk kedua orang tua saya Ayahanda tercinta Mustamin. B dan Ibunda tercinta Faisah yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril dan materil, mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta kasih sayang. Ucapan terima kasih juga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag,selaku Dekan Fakultas Syariah dan hukum, Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag, selakuWakil Dekan bidang

Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Hamsir, SH.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Segenap Pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Teruntuk Ibu Istiqamah, SH., MH. dan Bapak Rahman Syamsuddin, SH., MH. Selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, nasehat, motivasi demi kemajuan penyusun.
4. Teruntuk Bapak Drs. H. Munir Salim. MH dan Ashabul Kahpi, S.Ag, MH Selaku pembimbing skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi demi kemajuan penyusun.
5. Teruntuk Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar terkhusus Ibu Hera, Pak Rais dan Pak Amiruddin yang telah memberikan ilmu, membimbing penyusun dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penyusun dalam penulisan skripsi ini dan semoga penyusun dapat amalkan dalam kehidupan di masa depan.
6. Kepada Bapak H. Mangung, SH yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Takalar.
7. Kepada Saudara-saudara kandung saya Musriana Mustamin, Nurnanengsi, Herlina Mustamin, Nirma Sakti Mustamin, Mirna Sakti Mustamin, Yuliana Mustamin, Risnawati Mustamin, Rezky Ananda Mustamin. Yang selalu Memberikan semangat, serta kasih sayang kepada saya.

8. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Hukum terkhusus Angkatan 2013 “MEDIATOR” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
9. Sahabat-sahabat saya di kampus Muh. Armadiansyah Siregar, Amiruddin, Ahmad Alka, Rezki Ameliah Nurhidayah, Astri Isnaeni, Mardas, Mirna Wahyuni, Farida Tahir, Nurannisa anas, M. Cakra Romokoy, Eka Agusriani Syamsur, Nurjannah, Dhita Mita Ningsih dan teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum “E” yang telah memberikan semangat dan bantuannya kepada saya selama penyusunan skripsi ini.
10. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penyusun dalam penyusunan penulisan skripsi ini baik secara materil maupun formil.

Penyusun menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Samata, 2017
Penyusun,

Muhammad Azhar Akbar

NIM: 10500113261

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEAHLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	Vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1-9
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Kajian Pustaka	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10-31
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	10
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan (263 KUHP)	26
D. Bilyet Giro	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32-35
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Pendekatan Penelitian	32
D. Metode Pengumpulan Data	33

E. Sumber Data	33
F. Instrumen Penelitian	34
G. Analisis Data.....	34
H. Pengujian Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36-58
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Takalar.....	36
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak PidanaPenipuan	38
C. ProsesPembuktian Cek dan Bilyet Giro Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Kasus Pidana	44
BAB V PENUTUP	59-60
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	;	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	ḍammah	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan yā	ai	a dan i
اَوَّ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... / آ...	Fathah dan alif atau yā	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan yā	ī	i dan garis di atas
و	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : rauḍah al-aṭfāl

المدينة الفا ضلة : al-madīnah al-fāḍilah

الحكمة : rauḍah al-aṭfāl

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

ربنا : rabbanā

نجينا : najjainā

الحق : al-ḥaqq

نعم : nu''ima

عدو : 'duwwun

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◡), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

علي : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عربي : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشمس : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزلازلة : al-zalzalāh (az-zalzalāh)

الفلسفة : al-falsafah

البلاد : al-bilādu

7. *Hamzah.*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تامرون : ta'murūna

النوع : al-nau'

شيء : syai'un

امرت : umirtu

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-jalālah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله dīnullāh با الله billāh

Adapun *tā'* marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:

في رحمة الله hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan:
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: subḥānahū wa ta'ālā
saw.	: ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
M	: Masehi
QS.../...: 4	: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	: Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama Penyusun : Muhammad Azhar Akbar
Nim : 10500113261
Judul Skripsi : PENGGUNAAN CEK DAN BILYET GIRO DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan Nomor.68/Pid.B/2016/PN.Tka)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan, serta untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian penipuan cek dan bilyet giro sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan kasus pidana.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Takalar. Tipe penelitian yang digunakan berbentuk studi putusan dengan menggunakan model penelitian kualitatif, serta penelitian lapangan berupa observasi serta mengambil data sekunder yang di peroleh dari Pengadilan Negeri Takalar yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa yang telah didakwakan melakukan tindak pidana sudah berdasar pada fakta fakta hukum yang ada. Setelah melihat faktor-faktor hukum yang ada yaitu primer dan sekunder, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur dakwaan primer ini tidak terpenuhi dan dengan tidak terpenuhinya unsur dakwaan ini, maka dakwaan primer Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Peneliti berharap Pemerintah dapat membuat undang-undang mengenai bilyet giro agar penegak hukum dalam hali ini hakim dalam memutuskan perkara tidak melanggar asas undang-undang. Bagaimanapun juga undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi. Selain itu Warga masyarakat harus menambah wawasan yang akan dijadikan masukan atau informasi mengenai surat-surat berharga khususnya bilyet giro, serta lebih waspada dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan makin berkembangnya dan majunya perekonomian Negara kita maka praktek perdaganganpun semakin maju dan rumit pula, sehingga mengakibatkan timbulnya beberapa problema pembayaran transaksi dalam dunia usaha apabila dilakukan dengan uang konten (uang kartal). Misalnya untuk menyelesaikan pembayaran transaksi perdagangan yang sangat besar dengan jarak yang terlalu jauh, resiko perampokan atau hilang di tengah perjalanan sangat besar. Selain itu masih ada kemungkinan terjadinya kesalahan pada waktu melakukan perhitungan uang yang dalam jumlah besar tadi.

Berdasarkan pada beberapa problema itulah yang menimbulkan prakarsa untuk menanggulangnya dengan cara yang lebih praktis ekonomis serta lebih aman yaitu para pengusaha menyimpan uang tunainya yang tidak atau belum dipergunakan, pada bank tertentu dalam bentuk rekening Koran giro (suatu bentuk penyimpanan dana di bank yang bebas rapi tapi rahasia). Kemudian mereka melakukan pembayaran dengan jalan memberikan surat perintah kepada bank penyimpanan dana agar membayar kepada orang yang ditunjuk atau memindahbukukan sejumlah dana simpanannya kedalam rekening orang yang ditunjuk. Hal ini dilakukan secara terus menerus sehingga lambat laun secara tetap surat perintah tadi tidak berubah dan beredar dalam masyarakat, yang selanjutnya di dalam dunia perbankan dikenal dengan nama “CEK” untuk surat perintah pembayaran dan “BILYET GIRO” untuk surat perintah pemindahbukuan dana.

Selanjutnya bila kita tinjau dari segi ekonomisnya, simpanan uang para pengusaha di bank tadi, yang dalam dunia perbankan disebut “REKENING KORAN GIRO” atau sering disebut “REKENING KORAN” atau “REKENING GIRO” saja, dapat dikatakan sebagai salah satu alternatif penyimpanan dana dari masyarakat yang relatif sangat murah pihak bank tidak perlu memberikan bunga. Hal ini sangat diperlukan oleh pemerintah guna membiayai pembangunan Negara Indonesia pada umumnya dan pembangunan di bidang ekonomi pada khususnya.

Pengaturan mengenai cek tertuang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wekboek van Koophandel, selanjutnya akan disingkat KUHD), sedangkan mengenai bilyet giro sampai sekarang belum ada undang-undang yang mengaturnya.

Sejalan dengan itu maka pemerintah, dalam hal ini bank Indonesia, berkewajiban memberikan pengarahan-pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Langkah kongkrit sikap pemerintah itu, diantaranya diwujudkan dengan menetapkan peraturan-peraturan hukum sebagai landasan berlakunya bilyet giro di Indonesia. Pada tahun 1967 telah diundangkan Undang-undang Nomer 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, dalam pasal 1 huruf e disinggung masalah simpanan giro dan pemindahbukuan. Sedangkan peraturan operasionalnya dikukuhkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomer 4/670 UPPB/PbB Tahun 1972 perihal bilyet giro (selanjutnya akan disingkat dengan SEBI No. 4/670 UPPB/PbB Tahun 1972) serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomer 5/85 UPPB/PbB Tahun 1972 Perihal Pembuatan/penerbitan cek, bilyet giro dan alat-alat lalu

lintas pembayaran giral lainnya (selanjutnya akan disingkat dengan SEBI No. 5/85 UPPB/PbB Tahun 1972).

Penggunaan bilyet giro berbeda dengan cek, bilyet giro tidak dapat diendosemen dan tidak dapat ditukar dengan uang tunai pada bank, selain itu dalam bilyet giro terdapat dua tanggal yaitu tanggal penarikan dan tanggal efektif.

Bilyet giro hanyalah merupakan surat perintah dari seorang nasabah pemegang rekening giro pada bank, untuk memindahbukukan dananya pada pihak lain.¹

Bilyet giro merupakan jenis surat berharga yang baru dibanding surat berharga yang lainnya secara giral. Bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan yang berfungsi sebagai alat pembayaran termasuk juga surat yang berharga. Maksud giro disini adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan (Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Perbankan).

Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral telah memasyarakat. Dalam praktek sehari-hari penggunaan bilyet giro sering terjadi pada pengusaha sebagai pemegang bilyet giro menggunakan bilyet giro sebagai alat bayar kredit dengan memindahtangankan bilyet giro kepada pengusaha lain. Perlu diketahui bahwa bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan dari tangan-ketangan maupun endosemen.

Bilyet Giro yang sudah dirasa aman tidak seperti cek dan wesel yang dapat diuangkan oleh orang yang tidak bertanggung-jawab, tetapi masih bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan dengan bilyet giro kosong.

¹ R. Ali Rido dan Ahmad Gozali, *Himpunan Peraturan Perundangan Hukum dagang Dalam Perkembangannya Tentang Surat Berharga*, Perbankan dan Kepailitan, (Jilid 2, cet. I, Bandung: Remaja Karya, 1984), h.56.

Penerbit disini memiliki wewenang untuk membatalkan (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Dir tanggal 4 juli 1995). Pembatalan karena dana penerbit tidak cukup. Permasalahan disini muncul ketika dana tidak cukup atau tidak ada tetapi bilyet giro tersebut sudah beredar atau dipegang oleh pemegang dan merugikan pemegang bilyet giro.

Bilyet giro ini merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral.² Untuk mengatasi hal inilah maka Direksi Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB Tahun 1972 tentang Bilyet Giro.

Sehubungan dengan pengertian cek dan bilyet giro tersebut, maka cek dan bilyet giro dapat dikategorikan sebagai akta dibawah tangan, karena cek dan bilyet giro hanya dibuat antara para pihak yang berkepentingan saja dan tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut, maka cek dan bilyet giro selain sebagai akta dibawah tangan juga dapat digunakan sebagai alat bukti.

Cek sebagai surat berharga mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalulintas perdagangan atau usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, cek dan bilyet giro mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:³

² Muhammad Abdul Kadir. *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, (Bandung, 2003), h. 224

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*, (Bandung: Alumni, 1993), h.17

Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang), Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjual-belikan dengan mudah dan sederhana), Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

Mengingat perkembangan teknologi yang sedemikian canggihnya, dimana orang lain ingin mendapatkan hal secara praktis maka cek dan bilyet giro sudah tidak asing lagi digunakan sebagai alat pembayaran. Dunia bisnis tidak dapat lepas begitu saja dari bidang hukum. Dalam melakukan perdagangan orang seringkali terbentur pada suatu masalah, dan menyelesaikannya melalui jalur pengadilan. Namun dalam perkembangannya, cek dan bilyet giro yang memiliki fungsi dibidang perdagangan ini juga dapat digunakan sebagai alat bukti diluar pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana proses pembuktian penipuan cek dan bilyet giro sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan kasus pidana ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka peneliti perlu dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan tentang Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Sebagai Alat Bukti Dalam

Proses Pemeriksaan Kasus Pidana Penipuan (studi putusan Pengadilan Negeri Takalar).

1. Fokus Penelitian

- a. Cek
- b. Bilyet Giro
- c. Alat Bukti
- d. Tindak Pidana

2. Deskripsi Fokus

- a. Cek

Cek adalah perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk. Cek dapat terbilang sah dan resmi apabila sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan.

- b. Bilyet Giro

Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank yang lain.

- c. Alat Bukti

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

d. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁸ Disamping itu E.Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau melalaikan (verzuim atau nalaten atau niet doen, negatif maupun akibatnya).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian penipuan cek dan bilyet giro sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan kasus pidana.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Agar penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan baru bagi penulis dan pembaca terutama mengenai Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Kasus Pidana Penipuan (studi putusan Pengadilan Negeri Takalar).

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul, khususnya dalam proses pembuktian.

E. Kajian Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sehingga memperkuat bahwasanya penelitian ini adalah penelitian asli, ada beberapa tulisan. Antara lain sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mazid “Peranan Bank Dalam Masalah Pembatalan Bilyet Giro” Fakultas Hukum Universitas Airlangga 1988.⁴ Pada skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana peranan bank dalam menangani proses pembatalan bilyet giro sedangkan dalam skripsi penulis lebih memfokuskan penelitian pada Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Kasus Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN Tka.)

Skripsi yang ditulis oleh Rizka Nurul Izzati “Aspek Pidana Dan Perdata Dalam Penerbitan Bilyet Giro Kosong (Studi Kasus Putusan No 01/Pid.B/2004/Pn.Ykjo No 16/Pid/2004/Pty Jo No 1827k/Pid/2004)” Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.⁵ Pada skripsi tersebut menjelaskan tentang mendalami mengenai aspek pidana dalam penerbitan bilyet giro kosong yang di dalam kasus tersebut terdapat putusan Hakim yang berbeda di tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sedangkan dalam skripsi penulis lebih memfokuskan

⁴ Ahmad Mazid, “Peranan Bank Dalam Masalah Pembatalan bilyet Giro”, *Skripsi (Universitas Airlangga, 1988)*.

⁵ Rizka Nurul Izzati, “Aspek Pidana Dan Perdata Dalam Penerbitan Bilyet Giro Kosong (Studi Kasus Putusan No 01/Pid.B/2004/Pn.Ykjo No 16/Pid/2004/Pty Jo No 1827k/Pid/2004)”, *Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014)*.

penelitian pada Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Kasus Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN Tka.)

Skripsi oleh Dini Wahyuningtyas, “Tindak Pidana Penipuan Bilyet Giro (studi kasus pengadilan negeri surakarta)” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017.⁶ Skripsi ini mencakup tentang bentuk perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong dan akibat hukum bagi penerbit bilyet giro kosong di Surakarta.



⁶ Dini Wahyuningtyas, “Tindak Pidana Penipuan Giro (studi kasus pengadilan negeri surakarta)” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengetian Tindak Pidana Menurut Ahli

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baard* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori

dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu :

- 1) Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
- 2) Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.¹

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.
5. Perasaan takut atau *vress*.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum

¹ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, (Bandung: 1981), h. 193

b. Kualitas dari si pelaku

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

1. Sengaja (*dolus*)
2. Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif:

1. Perbuatan manusia
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia
3. Keadaan-keadaan
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.³

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a. Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

² P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, h. 193

³ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 295

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsurunsur tindak pidana dalam UU.
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*.

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)
Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
 2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*).
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
 3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*). Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.
- b. Kesalahan (*Culpa*)

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku

tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁴

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana diluar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

3. Faktor Terjadinya Tindak Pidana

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan atau pidana. Bisa dilihat sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan norma, terutama norma hukum. Separovic mengemukakan ada dua (2) faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu:

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), h. 65-72

1. Faktor personal termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan)
2. Faktor situasional seperti konflik, faktor tempat dan waktu Dalam perkembangannya terdapat beberapa faktor berusaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan.

A. Teori Tentang Sebab-sebab tindak pidana

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Adapun teori-teori kriminologi tentang tindak pidana, sebagai berikut:⁵

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak. Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-

⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Cetakan ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 42

undang tersebut. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Pendapat ekstrim tersebut dipermak menjadi dua hal:

- a. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara intelektual suka dan duka.
- b. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo Klasik.

Menurut Made Dharma Weda bahwa Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa takutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori neo klasik adalah sebagai berikut :⁶

⁶ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 30

- a. adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya. Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih dari pada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang berubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja, sebab-sebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan salah. Berdasarkan ciri khas teori neo klasik, tampak bahwa teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori – teori neo-klasik menunjukkan permulaan

pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/ tingkah laku manusia. Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggungjawab atas kelakuannya.

Menurut A.S. Alam bahwa : Teori-teori klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat melakukan kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo-klasik, anak-anak dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggungjawab atas perbuatannya.

3. Teori Kartografi/Geografi

Teori kartografi yang berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Bahwa Teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini bahwa “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.” Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara

melakukan kejahatan.”Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dankeadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5.Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:⁷

a.Teori Lombroso/Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso bahwa, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir(criminal is born). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso yaitu:

1. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda.
2. Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit.
3. Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku Criminal.

⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 91

4. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan.

5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Berbicara mengenai pengertian tindak pidana penipuan haruslah diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi pengertian penipuan tersebut, di dalam KUHP buku ke II Titel XXV berjudul “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari title itu, yaitu pada Pasal 378, mengenai tindak pidana oplichting yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit. Penipuan dalam arti luas (bedrog) yang memuat tidak kurang dari 17 pasal (Pasal 379a - 379bis) yang merumuskan tindak-tindak pidana lain yang semuanya bersifat menipu (bedriegen). Pemakaian bedrog juga mengatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.

Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.⁸

⁸ Roni Wiyanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: C.V.Mandar Maju 2012), h. 116

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya. Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut, “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”⁹

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, bahwa: Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. (Cetakan Keenam, Bandung: Citra Aditya, 2006), h. 29

yang seakan-akan benar. Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepada kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

2. Unsur-unsur tindak pidana penipuan

Bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 tersebut yaitu:¹⁰

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
2. Menyerahkan (afgifte) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang dengan menggunakan upaya-upaya atau caracara:
 - a. Memakai nama palsu

¹⁰ Agus Sardjono, Pengantar hukum dagang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.9

- b. Memakai kedudukan palsu
 - c. Memakai tipu muslihat
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri
 4. sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut :¹¹

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Darimaksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - b. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.

- c. Sipeipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP. Sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP mengatur bahwa :¹²

1. Menggunakan akal palsu nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya

¹¹ Cansil dan Cristhine Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), h.30

¹² KUHP pasal 378 mengenai penipuan

bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.

2. Menggunakan kedudukan palsu seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya : X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

3. Menggunakan tipu muslihat Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.

4. Menggunakan susunan belit dusta kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan

yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbutannya.

3. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.¹³

¹³ Cansil dan Cristhine Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, h. 36

C. Tinjauan umum tentang tindak pidana pemalsuan (263 KUHP)

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

D. Bilyetgiro

Perkembangan ekonomi makro telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap aspek politik, hukum, industri, sosial, dan budaya suatu negara. Konsekuensi logis (*adequat*) dari perkembangan ekonomi suatu negara adalah meningkatnya lalu lintas pembayaran dalam transaksi perdagangan. Mulai dari transaksi jual beli dengan nilai kecil seperti pasar rakyat, hingga transaksi jual beli dengan nilai yang fantastis.¹⁴ Pada transaksi jual beli produk komersial yang bernilai tinggi, melibatkan jumlah uang yang sangat besar akan berbahaya dan beresiko tinggi. Mengingat factor keamanan, maka bank selaku lembaga keuangan telah menciptakan beberapa alternatif sistem pembayaran, baik dengan menggunakan uang kartal maupun uang giral yang efektif, efisien, aman dan dapat digunakan dengan jumlah yang sangat

¹⁴ ZainalAsakin, *pengantar hukum perbankan indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 4

besar. Salah satu sistem perbankan yang diciptakan pemerintah sebagai penunjang dinamika sistem pembayaran ialah dibuatkanlah surat berharga sebagai alat pembayaran. Penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran dalam praktik bisnis skala nasional maupun international terbukti diminati meskipun terkadang penggunaan surat berharga dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena, penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran terbukti efektif dalam memperlancar lalu lintas perdagangan, seharusnya pemerintah memberikan atensi terhadap resiko timbulnya kerugian dalam penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran. Surat berharga sebagai alat pembayaran terdiri dari beberapa macam dengan karakteristik yang berbeda-beda.¹⁵ Surat berharga didefinisikan sebagai surat yang dibuat oleh seseorang sebagai pelaksanaan suatu prestasi yang merupakan pembayaran sejumlah nilai uang, namun pembayaran tersebut tidak dilaksanakan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat pembayaran yang berupa surat yang didalamnya terdapat suatu pesan atau perintah terhadap pihak ketiga yaitu bank, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga itu disebabkan karena adanya perjanjian lebih dahulu antara para pihak. Penerbitan surat berharga sebagai kontra prestasi atau pelaksanaan suatu kewajiban merupakan bentuk perjanjian (jual-beli) atau perikatan “perikatan dasar” (*onderliggende verhauding*). Tanpa dimulai dengan adanya hubungan perikatan tidak mungkin telah diterbitkan surat berharga sebagai alat pembayaran. Sehingga penerbitan surat berharga sebagai alat pembayaran dipandang sebagai bentuk

¹⁵ ZainalAsakin, *pengantar hukum perbankan indonesia*, h. 4

perbuatan (*handeling*) yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu akibat dari lahirnya suatu perbuatan hukum lain, yakni adanya hubungan perikatan. Saat ini dikenal beberapa jenis surat berharga yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan.¹⁶ Salah satu bentuk surat berharga tersebut adalah Bilyet Giro. Bilyet giro ini merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukumn Dagang (KUHD), sebab Bilyet giro adalah surat berharga yang tumbuh dalam praktek karena adanya tuntutan kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral.¹ Ketentuan yang mengatur tentang bilyet giro terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tanggal 24 Januari 1972 No. 4/670/UPPB/PbB, yang disempurnakan dengan: Surat Keputusan Direktur No. 28/32 KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995, Surat Edaran No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995, Surat Edaran No. 2/10/DASP/ tanggal 8 Juni 2000, Surat Edaran No. 4/17/DASP tanggal 7 November 2002. Bilyet giro sifatnya hanya merupakan perintah pemindahbukuan dari penerbit kepada bank untuk kepentingan penerima bilyet giro. Karena hanya dapat digunakan untuk pemindahbukuan saja dan tidak dapat diuangkan (diambil secara tunai) maka dirasa lebih aman, sehingga masyarakat cenderung untuk menyukainya. Namun dalam kenyataannya bilyet giro yang diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai alat pembayaran giral yang praktis, efisien, dan aman belum terwujud sepenuhnya. Hal ini disebabkan dengan adanya masalah yang timbul dalam penggunaan bilyet giro, khususnya dalam kaitannya dengan tanggung jawab penerbit bilyet giro terhadap bilyet giro yang kewajibannya tidak dapat terlaksana. Dengan adanya masalah tersebut, maka dapat menimbulkan kerugian pada

¹⁶ Agus Sardjono, Pengantar Hukum Dagang, h. 6

masyarakat, khususnya pemegang bilyet giro maupun pihak bank sebagai tertarik, yang akibatnya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bilyet giro khususnya dan terhadap bank pada umumnya. Selama ini masalah terkait penerbitan bilyet giro yang kewajibannya tidak terlaksana cenderung diangkat dalam ranah hukum perdata sehingga tercipta pemikiran bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan bilyet giro, pasti penyelesaiannya melalui jalur perdata. Dengan adanya pemikiran ini, mengakibatkan beberapa orang menggunakan masalah ini sebagai modus untuk melakukan kejahatan, dimana penyelesaiannya menggunakan ranah pidana. Memperhatikan pengertian tentang Bilyet Giro yang disebutkan, maka jelas bahwa:¹⁷

1. BG adalah surat perintah dari Penarik kepada Tertarik untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening Penarik yang bersangkutan kepada rekening Pemegang yang disebutkan namanya dalam surat perintah tersebut.
2. Penarik adalah Pemilik Rekening yang memerintahkan Tertarik melakukan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban Rekeningnya kepada pihak yang disebutkan namanya dalam surat perintah tersebut.
3. Tertarik adalah bank yang menerima perintah pemindahbukuan dana dari Penarik.
4. Pemegang adalah nasabah yang namanya disebut dalam BG untuk memperoleh pemindah bukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Tertarik.
5. Bank Penerima adalah bank yang melakukan penagihan BG kepada tertarik untuk kepentingan Pemegang.

¹⁷ ZainalAsakin, *pengantar hukum perbankan indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 12

6. BG tidak dibayar dengan uang secara tunai, tetapi hanya merupakan Pemindahbukuan.
7. BG berbentuk atas nama (op naam).
8. BG tidak dipindahtangankan atau diendosemenkan.
9. BG tidak dapat diperdagangkan.
10. Penerima BG baru dapat menerima pemindahbukuan / menikmati hak yang tercantum dalam BG tersebut apabila memiliki rekening bank.

Berdasarkan dari ciri-ciri BG itu yang membuat kurang mendapat respon yang baik dari masyarakat, masyarakat lebih senang menggunakan cek dibandingkan BG, namun sejak adanya sanksi Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Pelarangan Penarikan Cek Kosong, yang dapat memberikan sanksi pidana cukup berat, maka masyarakat pun beralih kembali pada BG.

Dalam Islam Al-quran menjelaskan pada (An-Nahl Ayat 94-95)

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ بِمَا
صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (94) وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا
قَلِيلًا إِنَّمَّا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95)

Artinya :

“Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki(mu) sesudah kokoh tegaknya, dan

kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar. (16: 94)”

“Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit (murah), sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (16: 95)”¹⁸

Ayat ini menjelaskan tentang haram dan pentingnya sumpah dan janji. Allah Swt berfirman, penyalahgunaan ajaran-ajaran sakral agama seperti sumpah untuk kepentingan dunia akan berdampak pada melemahnya keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap agama dan akan menyebabkan mereka menyimpang dari jalan kebenaran. Orang-orang yang telah menghalangi manusia dari jalan kebenaran akan mendapat kesulitan dan masalah pertama mereka di dunia. Mereka juga akan mendapat siksa yang pedih di Hari Kiamat. Oleh sebab itu, jangan menjual nama Allah sebagai sumpah untuk memperoleh kepentingan dunia dan materi di dunia.



¹⁸ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, h. 272

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan (*field reseach*). Yaitu penelitian secara langsung di Pengadilan Negeri Takalar untuk mengetahui bagaimana Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Kasus Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN Tka.)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Takalar, dengan alasan adanya kasus tentang pidana penipuan bilyet giro di Pengadilan Negeri Takalar,

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurung waktu tertentu. Secara mendalam studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer.¹

¹ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), h. 76

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, Antara lain:

1. Observasi

Pengumpulan data dengan cara mempelajari, memahami, mencatat data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Takalar yang berkaitan dengan penelitian.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini diperoleh dengancara Tanya jawab kepada narasumber langsung yang bersangkutan Di Pengadilan Negeri Takalar.

3. Dokumentasi

Peniliti secara langsung datang ke pengadilan Negeri Takalar guna mendapatkan data penelitian untuk menunjang analisis data penilitian sehingga metode penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal.

E. Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Untuk data primer, penelitian untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara Hakim Pengadilan Negeri Takalar. Dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat dan ditujukan kepada narasumber.

2. Data Sekunder

Untuk data sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menelaah literatur-literatur yang relevan untuk penelitian. Selain itu penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, yang mana data-data tersebut dapat dianalisis dan mempunyai hubungan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

F. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi: pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.² Penyusun dengan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan data tersebut.³ Seluruh data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Kasus Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN Tka.)

² Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263

³ Winarmo Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), h. 139.

H. Pengujian Keabsahan Data

1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam dengan cara sistematis.

2. Menggunakan Bahan Referensi

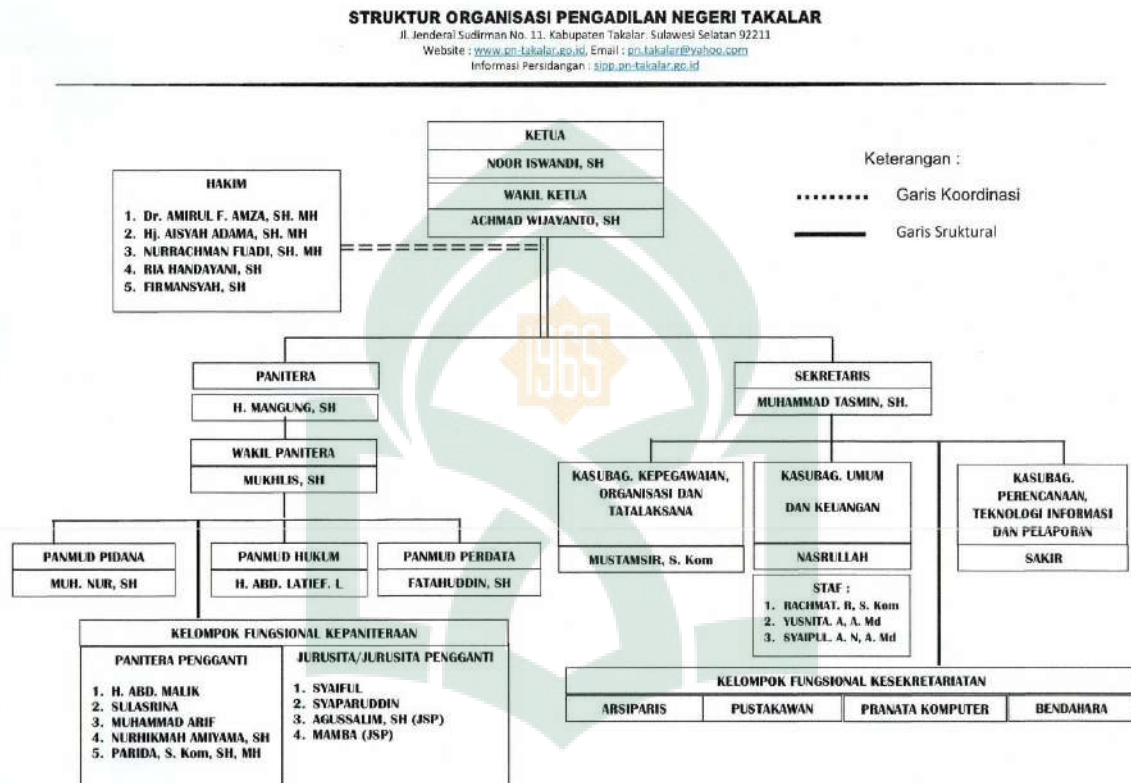
Yang dimaksud dengan Bahan Referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah di temukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara dan observasi yang telah ditemukan oleh peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Takalar



Pengadilan Negeri Takalar sendiri berdiri pada tahun 1967 dimana pada saat itu pelayanan bagi pencari keadilan di Kabupaten Takalar masih satu bangunan dengan Pengadilan Negeri Makassar, pada tahun 1965 Pengadilan Negeri Takalar bergabung di bangunan kantor Bupati Kabupaten Takalar selanjutnya pada tahun 1968 berdiri bangunan kantor Pengadilan Negeri Takalar di Jalan Fitrah Takalar yang baru diresmikan pada tahun 1969 dan terakhir pada tahun 1982 dibangun kantor Pengadilan Negeri Takalar di Jalan Jenderal Sudirman sampai sekarang;

Sejak berdirinya tahun 1967, Pengadilan Negeri Takalar telah 17 (tujuh belas) kali berganti pucuk kepemimpinan sebagai berikut:

1. Abd. Muluk Ds, S.H (1968 – 1978)
2. Sopanuddin, S.H (1978 – 1982)
3. Abbas Somantri (1982 – 1986)
4. Soewardi, S.H (1986 – 1990)
5. Sohartono, S.H (1990 - 1993)
6. Fhaki Suah, S.H (1993 - 1996)
7. H. Muhammad Ramli, S.H (1996 - 1998)
8. H. A. Suryadarma Belo, S.H (1998-1999)
9. Hj. Napi Napisah, S.H (1999 - 2003)
10. Ahmad Semma, S.H (2003 - 2006)
11. H. Ridwan Toro, S.H Mh. (2006 - 2008)
12. Supriyono, S.H, M.H (2008 - 2010)
13. Lenny Wati Mulashimadi, S.H (2010 - 2011)
14. H. Akhmad Suhel, S.H (2011 – 2013)
15. Rakhman Rajagukguk, S.H, M. Hum (2013-2015)
16. Gede Sunarjana, S.H, M.H (2015-2017)
17. Noor Iswandi, S.H (2017-Sekarang)

Pergantian kepemimpinan mana membawa perubahan sedikit demi sedikit, baik dari segi manajemen (*all of management*) maupun kebijakan institusi (*Policy of Institution*) yang sejalan dengan rencana pembaharuan Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri Takalar masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makasar, dan wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Takalar dengan luas wilayah kurang lebih : 486,25 Km² atau 48,642,48 Ha, yang terbagi dalam 9 Kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan sebanyak : 91 desa/kelurahan.

B. Prose Pembuktian Penipuan Cek dan Bilyet Giro Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Kasus Pidana Yaitu

- Bermula pada tanggal 21 Oktober 2016 sekitar jam 07.30 Wita ketika Terdakwa datang ke rumah saksi korban HASAN ALAMUDI, SH alias TUAN HASAN Bin ALAMUDI untuk meminjam uang dengan alasan untuk keperluan biaya pengurusan adik Terdakwa yang diterima menjadi anggota kepolisian serta untuk membeli keperluan belanja bahan bangunan yang dijual di toko Terdakwa sehingga korban merasa iba dan tergerak hatinya untuk memberikan pinjaman sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan. - Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2014 jam 09.27 Wita, saksi korban melakukan pengiriman uang melalui transfer dari rekening saksi korban No. Rek BRI 5091-01-004914-53-8 An. Hasan Alamudi kepada rekening milik terdakwa ISMAIL No. Rek BRI 5091-01-004023-53-1 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh

juta rupiah) melalui kantor BRI Unit Tamalate Kel. Bontolebang Kec. Galesong Utara Kab. Takalar. Kemudian pada tanggal 03 November 2014 sekitar jam 13.26 Wita, saksi korban mengirim uang kepada Terdakwa untuk kedua kalinya dengan cara transfer dari rekening saksi korban No. Rek BRI 5091-01-004914-53-8 An. Hasan Alamudi kepada rekening milik terdakwa ISMAIL No. Rek BRI 5091-01004023-53-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui kantor BRI Unit Mamajang Kota Makassar. Lalu pada tanggal 22 Desember 2014 sekitar jam 07.31 Wita saksi korban kembali mengirim uang untuk ketiga kalinya kepada Terdakwa dengan cara transfer dari rekening saksi korban No. Rek BRI 5091-01-004914-53-8 An. Hasan Alamudi kepada rekening milik terdakwa ISMAIL No. Rek BRI 5091-01-004023-53-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui kantor BRI Unit Tamalate Kel. Bontolebang Kec. Galesong Utara Kab. Takalar.

- Bahwa setelah menerima dana dari Saksi Korban dengan total sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa mengembalikan pinjamannya kepada saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) serta Terdakwa juga pernah memberikan bilyet giro No. GFN 445522 dengan nomor rekening 0250-01-000578-30-1 atas nama Ismail namun ternyata kosong. Selain itu Terdakwa juga tidak mengakui bahwa saksi korban pernah melakukan transfer uang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan menganggap uang tersebut adalah uang dari pinjaman kredit yang diajukan oleh

Terdakwa tanpa pernah mengecek kebenarannya sehingga uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli barang-barang untuk toko bangunan milik Terdakwa. - Bahwa setelah jatuh tempo saksi korban berusaha menagih haknya kepada Terdakwa dengan berjanji akan menyelesaikan kewajibannya apabila tanah milik Terdakwa yang dijual sudah laku serta beralasan apabila kredit di Bank cair maka akan segera menyelesaikan kewajibannya kepada Saksi Korban. Karena merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, Saksi Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Galesong Utara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Hasan Alamudi, SH alias Tuan Hasan mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Akhirnya perbuatan Terdakwa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu korban Hasan Alamudi, SH alias Tuan Hasan untuk menyerahkan barang berupa uang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) milik Saksi Korban beserta barang bukti dibawa ke Polsek Galesong Utara untuk diproses lebih lanjut.

Selanjutnya, perbuatan terdakwa Ismail Dg. Sese Bin Amir Dg. Sirua sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP.

Setelah mendengar penjelasan atau bukti yang di ajukan oleh saksi korban Hasan Alamudi, SH adalah berupa :

- 3 (tiga) lembaran surat laporan transaksi No. Rekening 5091-01-004914-53-8 atas nama Hasan Alimudin, alamat Dusun campagaya Desa Tamasaju Kec.Galesong Utara Kab. Takalarming priode transaksi tanggal 01/10/14, tanggal 01/11/ 14-30/11/14 dan tanggal transaksi 01/12/14-31/12/14 yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Tamalate Takalar.
- 3 (tiga) lembar fotocopy slip penarikan dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) masing-masing selemba slip penarikan tanggal 21 Oktober 2014, dengan No. Rekening 5091-01-004914-53-8 atas nama Hasan Alamudi transfer uang tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ke No. Rekening 5091-01-004-023-53-1 atas nama Ismail, serta slip penarikan tanggal 3 November 2014, dengan No. Rekening 5091-01-004914-53-8 atas nama Hasan Alamudi transfer uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke No. Rekening 5091-01-004023-53-1 atas nama Ismail, serta slip penarikan pada tanggal 22 Desember 2014, dengan No. rekening 5091-01-004914-53-8 atas nama Hasan Alamudi transfer uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke No. rekening 5091-01-004023-53-1 atas nama Ismail.
- 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman uang tunai sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman kurang lebih 2 (dua) bulan yang di tanda tangani oleh Ismail diatas materai tempel 6000, Bontolembang 21 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar bilyet No. GFN445522 dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk senilai Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

- Surat keterangan dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk yang menerangkan bahwa bilyet giro No. GFN445522 dengan No. rekening 0250-01-000578-30-1 atas nama Ismail belum pernah dcairkan di BRI Kanca Takalar.

Selemba surat perjanjian membayar yang dibuat yang ditanda tangani oleh Tuan Hasan Alamudin tanggal 25 November 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: - Bahwa Terdakwa telah mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang kepada korban Hasan, dimana Terdakwa meminjam sejumlah uang yang telah diakui dan dibenarkan oleh korban, uang tersebut ditransfer ke rekening bank atas nama Terdakwa ; - Bahwa antara korban dan Terdakwa tidak memiliki perjanjian pinjam meminjam uang dengan pengenaan bunga tertentu, namun antara keduanya membenarkan jika ada kesepakatan berupa Terdakwa akan melakukan pembayaran hutangnya disertai dengan uang jasa, namun tidak ditentukan besaran nilai dari uang jasa tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut bukan untuk keperluan mengurus pendaftaran saudaranya menjadi anggota Polri ;
- Bahwa korban melakukan transfer uang sebanyak Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), pada tanggal 3 November 2014 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 22 Desember 2014 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga total dana yang ditransfer

korban ke rekening Terdakwa adalah sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya uang masuk ke rekeningnya pada tanggal 3 November 2014 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 22 Desember 2014 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun hal itu diketahui Terdakwa setelah diperiksa di polisi
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui mengajukan pinjaman kepada saksi korban sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dalil korban, sedangkan nilai pinjaman yang benar diakui oleh Terdakwa dan korban adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang kemudian dibenarkan Terdakwa dan korban telah dicatat dalam kwitansi yang ditandatangani bersama oleh keduanya ;
- Bahwa terhadap bukti kwitansi berisi catatan nilai pinjaman Rp210.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibuat sendiri oleh korban bukan di hadapan Terdakwa dan isinya dibantah oleh Terdakwa serta tidak diketahui juga kebenarannya oleh saksi Hamziah, yang walaupun ikut bertandatangan di kwitansi, namun ia hanya menandatangani karena disuruh suaminya saksi Korban Hasan, dan tidak mengetahui apakah benar Terdakwa meminjam uang sejumlah itu;
- Bahwa terkait dengan surat pembayaran uang yang pernah dimintakan kepada Terdakwa untuk ditandatangani, tidak ada satu pun saksi yang secara persis

mengetahui besar pinjaman yang diajukan Terdakwa kepada korban selain hanya berdasarkan surat yang dibuat sendiri oleh korban ;

- Bahwa Terdakwa memang telah melakukan sejumlah pembayaran atas pinjamannya kepada korban, namun masih belum lunas ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keberatan dan menolak membayar hutang dengan besaran jumlah yang diminta korban untuk dikembalikan dikarenakan Terdakwa merasa nilai hutangnya tidak seperti yang dikemukakan korban ;

C. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa yang telah didakwakan melakukan tindak pidana sudah berdasar pada fakta fakta hukum yang ada. bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Unsur “Barangsiapa” 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat

dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya ; Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama ISMAIL Dg SESE Bin AMIR Dg SIRUA sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, ternyata benar terdakwa ISMAIL Dg SESE Bin AMIR Dg SIRUA dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta para Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah ada suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat pelaku untuk melakukannya tanpa ada hak untuk itu karena akibat perbuatan tersebut memang dikehendaki olehnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjadi permasalahan utama dalam perkara ini adalah adanya peristiwa penyerahan sejumlah uang dari korban kepada Terdakwa dalam suatu bentuk perbuatan hukum hutang piutang, sebagaimana diakui dan dibenarkan sendiri, baik oleh Terdakwa dan korban, khususnya dalam peran Terdakwa sebagai peminjam dan korban selaku pemberi pinjaman atau hutang. Walaupun keterangan para saksi di persidangan tidak satupun yang dapat menjelaskan secara jelas besaran nilai dari hutang yang diperjanjikan antara Terdakwa dengan korban, namun para saksi membenarkan baik berdasarkan keterangan korban maupun Terdakwa adalah benar jika antara

korban dan Terdakwa memiliki suatu perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang sejumlah uang.

Menimbang, bahwa awal dari peristiwa hukum yang melibatkan Terdakwa dengan korban adalah saat Terdakwa menemui korban yang memiliki profesi menjalankan/ memutar uang, yaitu profesi meminjamkan uang dengan pengembalian yang dikenakan bunga, dimana Terdakwa mengutarakan maksudnya untuk meminjam uang dan atas permintaan Terdakwa tersebut korban mengabulkannya, dengan suatu kesepakatan pengembalian hutang Terdakwa tidak dikenakan bunga melainkan berupa tambahan uang yang disebut sebagai uang jasa.

Kasus Posisi

Bermula pada tanggal 21 oktober 2016 sekitar jam 07.30 Wita ketika terdakwa datang kerumah saksi korban Hasan Alamudi, SH alias Tuan Hasan Alamudi untuk meminjam uang dengan alasan untuk keperluan biaya pengurusan adik terdakwa yang diterima menjadi anggota kepolisian serta untuk membeli keperluan belanja bahan bangunan yang dijual di took Terdakwa sehinggal korban merasa iba dan tergerak hatinya untuk memberikan pinjaman sebesar Rp. 270.000.000, - (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian antara (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan.

Selanjutnya pada tanggal 21 oktober 2014 jam 09.27 wita, saksi korban melakukan pengiriman uang melalui transfer dari rekening saksi korban No. Rek BRI 5091-01-004914-53-8 An. Hasan Alamudi kepada rekening milik terdakwa Ismail No.

Rek BRI 5091-01-004023-53-1 sebesar Rp. 110.000.000, - (seratus sepuluh juta rupiah) melalui kantor BRI Unit Tamalate Kel. Bontolebang Kec. Galesong Utara Kab. Takalar. Kemudian pada tanggal 03 November sekitar jam 13.26 Wita, saksi korban mengirim uang kepada Terdakwa untuk kedua kalinya dengan cara transfer dari rekening saksi korban No. Rek. BRI 5092-02-004924-53-8 An. Hasan Alamudi kepada rekening milik terdakwa Ismail No. Rek BRI 5091-01-004023-53-1 sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) melalui kantor BRI Unit Mamajang Kota Makassar. Lalu pada tanggal 22 Desember 2014 sekitar jam 07.31 Wita saksi korban kembali mengirim uang untuk ketiga kalinya kepada terdakwa dengan cara transfer dari rekening saksi korban No. Rek BRI 5091-01-004914-53-8 An. Hasan Alamudi kepada rekening milik terdakwa Ismail No. Rek BRI 5091-01-004023-53-1 sebesar Rp. 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) melalui kantor BRI Unit Tamalate Kel. Bontolebang Kec. Galesong utara Kab. Takalar.

Bahwa setelah menerima dana dari saksi korban dengan total sebesar Rp. 270.000.000, - (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), terdakwa mengembalikan pinjamannya kepada saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah sebesar 105.000.000, - (seratus lima juta rupiah) serta Terdakwa juga pernah memberikan bilyet giro No. GFN 445522 dengan nomor rekening 0250-01-000578-30-1 atas nama Ismail namun ternyata kosong. Selain itu terdakwa juga tidak mengakui bahwa saksi korban pernah melakukan transfer uang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 170.000.000, - (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan menganggap uang tersebut adalah uang dari pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa tanpa pernah mengecek kebenarannya

sehingga uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membeli barang-barang untuk took bangunan milik terdakwa.

Bahwa setelah jatuh tempo saksi korban berusaha menagih haknya kepada Terdakwa dengan berjanjin akan menyelesaikan kewajibannya apabila tanah milik Terdakwa yang dijual sudah laku serta beralasan apabila kredit di BANK cair maka akan segera menyelesaikan kewajibannya kepada saksi korban. Karena merasa dirugikan oleh Terdakwa, saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Sektor Galesong utara.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Hasan Alamudi, SH alias Tuan Hasan mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000.000, - (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Akhirnya perbuatan Terdakwa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu korban Hasan Alamudi, SH alias Tuan Hasan untuk menyerahkan barang berupa uang sebesar Rp. 270.000.000, - (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) milik saksi korban beserta barang bukti dibawa Kapolsek Galesong Utara untuk diproses lebih lanjut.

1. Dakwaan

Bahwa terdakwa Ismail Dg. Sese Bin Amir Dg. Sirua pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di

Kelurahan Bontolembang Kec. Galesong Utara Kab. Takalar atau tidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- a. Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa datang kerumah saksi korban Hasan Alamudi, SH alias Tuan Hasan Bin Alamudi untuk meminjam uang dengan alasan untuk keperluan pengurusan adi Terdakwa yang diterima menjadi anggota kepolisian serta untuk membeli keperluan belanja bahan bangunan yang dijual di toko Terdakwa sehingga korban merasa iba dan tergerak hatinya untuk memberikan pinjaman sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan.
- b. Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2014 jam 09.27 Wita, saksi korban melakukan pengiriman uang melalui transfer dari rekening saksi korban No. Rek BRI 5091-01-004914-53-8 An. Hasan Alamudi kepada rekening milik Terdakwa Ismail No. Rek BRI 5091-01-004023-53-1 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh rupiah) melalui Kantor BRI Unit Tamalate Kel. Bontolembang Kec. Galesong Utara Kab. Takalar. Kemudian pada tanggal 03 November 2014 sekitar jam 13.26 Wita, saksi korban mengirim uang kepada Terdakwa untuk kedua kalinya dengan cara transfer dari rekening saksi korban No. Rek BRI 5091-01-004914-53-8 An. Hasan Alamudi kepada rekening milik Terdakwa Ismail No. Rek BRI 5091-01-

004023-53-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui kantor BRI Unit Mamajang Kota Makassar. Lalu pada tanggal 22 Desember 2014 sekitar jam 07.31 Wita saksi korban kembali mengirim uang untuk ketiga kalinya kepada Terdakwa dengan cara transfer dari rekening saksi korban No. Rek BRI 5091-01-004914-53-8 An. Hasan Alamudi kepada rekening milik Terdakwa Ismail No. rek BRI 5091-01-0040023-53-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui kantor BRI Unit Tamalate Kel. Bontolembang Kec. Galesong Utara Kab. Takalar.

- c. Lalu setelah menerima dana dari saksi korban dengan total Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh rupiah) Terdakwa mengembalikan pinjaman kepada saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) Serta Terdakwa juga pernah memberikan bilyet giro No. GFN 445522 dengan nomor rekening 0250-01-000578-30-1 atas nama Ismail namun ternyata kosong. Selain itu Terdakwa juga tidak mengakui bahwa saksi korban pernah melakukan transfer uang sebanyak 2 (Dua) kali sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan menganggap uang tersebut adalah uang dari pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa tanpa pernah mengecek kebenarannya sehingga uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli barang-barang untuk toko bangunan milik Terdakwa.
- d. Bahwa setelah jatuh tempo saksi korban berusaha menagih haknya kepada terdakwa dengan berjanji akan menyelesaikan kewajibannya apabila tanah milik Terdakwa yang dijual sudah laku serta beralasan apabila kredit di Bank Cair maka

akan segera menyelesaikan kewajibannya kepada saksi korban. Karena merasa dirugikan oleh terdakwa, saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian sektor Galesong Utara.

- e. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Hasan Alamudi, SH alias Tuan Hasan mengalami kerugian sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- f. Akhirnya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa uang sebesar Rp 270.000.000, (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Hasan Alamudi, SH alias Tuan Hasan, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Galesong Utara untuk diproses lebih lanjut.

2. Pertimbangan Majelis Hakim

- a. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan kedepan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang bernama Ismail Dg. Sese Bin Amir Dg. Sirua sebagaimana tersebut didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, ternyata benar Terdakwa Ismail Dg. Sese Bin Amir Dg. Sirua dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas dan

bukan orang lain serta para Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

- b. Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” artinya adalah perbuatan tersebut dilakukan keadaan sadar dan niat pelaku untuk melakukannya karena akibat perbuatan tersebut memang dikehendaki olehnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh selama persidangan, Terdakwa sendiri memberikan keterangan jika ia memang pernah menemui korban untuk mengajukan pinjaman uang, diaman sesuai keterangan terdakwa nilai uang yang dimintanya adalah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan selanjutnya setelah bersepakat dengan korban, uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian telah diterima Terdakwa melalui mekanisme transfer bank dari rekening korban ke rekening Terdakwa.

Menimbang bahwa ternyata setelah menerima transfer korban, masih ada sejumlah transfer lain yang diterima Terdakwa direkeningnya, dan terdakwa kemudian walaupun menyadari tidak pernah mengajukan pinjaman lain baik ke pihak bank maupun korban.

Menimbang bahwa sebagai pihak yang berhutang, maka terdakwa memiliki kewajiban secara hukum membayar dan melunasi semua hutangnya, namun kenyataannya terdakwa hanya ingin membayar sebagian dari total uang yang diterimanya dari korban, yaitu Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)

sedangkan selebihnya Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) terdakwa menolak untuk membayar dan mengakuinya sebagai hutang karena merasa tidak pernah memintanya.

Menimbang bahwa Majelis berpendapat jika memang terdakwa tidak pernah meminta atau meminjam lagi uang dari korban sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), maka dengan demikian uang tersebut merupakan milik dari korban dan terdakwa secara hukum diwajibkan untuk mengembalikannya, terlebih karena secara nyata terdakwa telah menggunakannya.

c. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” artinya barang yang dikuasai oleh terdakwa tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya adalah kepunyaan orang lain.

d. Menimbang bahwa mengenai unsur “benda itu ada padanya bukan karena kejahatan” artinya adalah bahwa terdakwa dalam menguasai barang tersebut adalah atas ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

3. Putusan pengadilan Negeri takalar

1. Menyatakan terdakwa Ismail Dg Sese Bin Amir Dg Sirua tersebut diatas, tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam primair Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ismail Dg Sese Bin Amir Dg sirua terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

5. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembaran surat laporan transaksi No. Rekening 5091-01-004914-53-8 atas nama Hasan Alimudin, alamat Dusun campagaya Desa Tamasaju Kec.Galesong Utara Kab. Takalarming priode transaksi tanggal 01/10/14, tanggal 01/11/ 14-30/11/14 dan tanggal transaksi 01/12/14-31/12/14 yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Tamalate Takalar.
 - 3 (tiga) lembar fotocopy slip penarikan dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) masing-masing selembor slip penarikan tanggal 21 Oktober 2014, dengan No. Rekening 5091-01-004914-53-8 atas nama Hasan Alamudi transfer uang tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ke No. Rekening 5091-01-004-023-53-1 atas nama Ismail, serta slip penarikan tanggal 3 November 2014, dengan No. Rekening 5091-01-004914-53-8 atas nama Hasan Alamudi transfer uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke No. Rekening 5091-01-004023-53-1 atas nama Ismail, serta slip penarikan pada tanggal 22 Desember 2014, dengan No. rekening 5091-01-004914-53-8 atas nama Hasan Alamudi transfer uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke No. rekening 5091-01-004023-53-1 atas nama Ismail.

- 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman uang tunai sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman kurang lebih 2 (dua) bulan yang di tanda tangani oleh Ismail diatas materai tempel 6000, Bontolembang 21 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar bilyet No. GFN445522 dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk senilai Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
- Surat keterangan dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk yang menerangkan bahwa bilyet giro No. GFN445522 dengan No. rekening 0250-01-000578-30-1 atas nama Ismail belum pernah dcairkan di BRI Kanca Takalar.
- Selembar surat perjanjian membayar yang dibuat yang ditanda tangani oleh Tuan Hasan Alamudin tanggal 25 November 2015.

4. Analisis Putusan

Terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas dapat dilakukan analisis unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mengenai Unsur Barang Siapa

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa berakal sehat , hal tersebut nampak selama pemeriksaan dipersidangan dan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara ini terdakwa dapat memahami dengan baik segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga ada korelasi yang bersesuaian antara pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh terdakwa. Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatanny maksudnya terdakwa dapat membedakan perbuatan

yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum, hal ini terbukti bahwa terdakwa dipersidangan mengakui dan mohon keringanan hukuman serta tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terbukti pada diri sendiri terdakwa.

2. Mengenai Unsur Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain yang Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau melawan hukum adalah ada suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan niat pelaku untuk melakukannya tanpa ada hak untuk itu karena akibat perbuatan tersebut memang dikehendaki olehnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang menjadi permasalahan utama dalam perkara ini adalah adanya peristiwa penyerahan sejumlah uang dari korban kepada terdakwa dalam suatu bentuk perbuatan hukum hutang piutang, sebagaimana diakui dan dibenarkan sendiri, baik oleh terdakwa dan korban, khususnya dalam peran terdakwa sebagai peminjam dan korban selaku pemberi pinjaman atau hutang. Walaupun keterangan para saksi persidangan tidak satupun yang dapat menjelaskan secara jelas besaran nilai dari hutang yang diperjanjikan antar terdakwa dan korban, namun para saksi membenarkan baik berdasarkan keterangan korban maupun terdakwa adalah benar jika antara korban dan terdakwa memiliki suatu perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang sejumlah uang.

Menimbang bahwa awal dari peristiwa hukum yang melibatkan terdakwa dengan korban adalah saat terdakwa menemui korban yang memiliki profesi menjalankan atau memutar uang, yaitu profesi meminjamkan uang dengan mengembalikan yang dikeanakan bunga, dimana terdakwa mengutarakan maksudnya untuk meminjam uang dan atas permintaan terdakwa tersebut korban mengabulkannya, dengan suatu kesepakatan pengembalian hutang terdakwa tidak dikenakan bunga melainkan berupa tambahan uang yang disebut sebagai uang jasa.

menimbang bahwa terkait dengan nilai uang yang diperoleh terdakwa dari korban, Majelis berpendapat :

- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti surat persidangan, diketahui korban mentransfer uang ke rekening bank atas nama terdakwa dalam 3 (tiga) tahap dengan total uang sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang menurut korban adalah sesuai dengan permintaan dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah membantah mengajukan pinjaman sejumlah itu dikenakan terdakwa hanya membutuhkan uang sebagai odal usaha sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan korban dan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat rincian rekening, memang benar jika terdakwa pernah menerima transfer dana dari korban sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) namun terdakwa juga ternyata benar direkeningnya masuk pula dua kali transfer lain dari terdakwa yang juga sudah habis dipergunakan oleh terdakwa.

- Bahwa dengan demikian walaupun terdakwa hanya mengakui meminjam Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) namun tidak menghapus fakta bahwa terdakwa menerima transferan dari korban hingga total Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), terlepas dari apakah terdakwa sendiri yang memintanya atau tidak, oleh karena memang juga tidak ada satupun saksi yang mengetahui beberapa berapa sebenarnya kesepakatan pinjam meminjam uang antara korban dengan terdakwa.
- Bahwa terkait dengan uraian dakwaan Penuntut Umum berkenaan dengan alasan Terdakwa mengajukan pinjaman kepada korban, yaitu guna kepentingan pengurusan pendaftaran saudaranya menjadi anggota Polri, hal tersebut hanya didasarkan dari keterangan saksi korban semata tanpa didukung oleh saksi lain, bahkan keterangan korban itu dibantahkan oleh terdakwa maupun saudaranya yang ternyata memang telah menjadi anggota Polri pada tahun 2012-2013, yang berarti lebih dahulu terjadi dari pada peminjaman uang yang diajukan terdakwa ditahun 2014. Dengan demikian tidak ternyata adanya kebohongan terdakwa pada alasan peminjaman uang yang dilakukannya.

Menurut pendapat saya kenapa majelis hakim memutuskan terdakwa untuk dibebaskan karena, tuntutan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum lebih mengarah kepidana dan hakim pun menjatuhkan putusan bebas karna menurut mejelis hakim tuntutan yang di dakwakan tidak sesuai dengan unsur pasal yang di dakwakan, sedangkan tuntutan tersebut lebih mengarah ke arah perdata (wanprestasi)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penggunaan cek dan bilyet giro dalam kasus tindak pidana penipuan studi putusan nomor 68/pid.b/2016/pn tka, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pembuktian penipuan cek dan bilyet giro sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan kasus pidana yaitu Sebagaimana saksi korban Hasan Alamudi, SH telah melaporkan bahwa terdakwa Ismail Dg. Sese Bin Amir Dg. Sirua pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Kelurahan Bontolebang Kec. Galesong Utara Kab. Takalar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu korban Hasan Alamudi, SH alias Tuan Hasan Bin Alamudi, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yaitu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa yang telah didakwakan melakukan tindak pidana sudah berdasar pada fakta fakta hukum

yang ada. bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Unsur “Barangsiapa” 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai solusi atas permasalahan yang dikemukakan:

1. Pemerintah dapat membuat undang-undang mengenai bilyet giro agar penegak hukum dalam hal ini hakim dalam memutuskan perkara tidak melanggar asas undang-undang. Bagaimanapun juga undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi.
2. Warga masyarakat agar dapat menambah wawasan yang akan dijadikan masukan atau informasi mengenai surat-surat berharga khususnya bilyet giro, serta lebih waspada dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.2011
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung. Penerbit Universitas Lampung.2009
- Wahyuningtyas, Dini. *Tindak Pidana Penipuan Giro (studi kasus pengadilan negeri surakarta)”, skripsi, Fakultas Hukum Universtas Muhammadiyah Surakarta*.2017
- Armada, Wina. *Wajah Hukum Pidana*. Cet 1. Pustaka Kartini. Jakarta.1989
- Asakin, zainal. *pengantar hukum perbankan indonesia*, rajawali pers, Bandung.2010
- Dellyana, Shant . *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hakim. Sinar Grafika cipta. Jakarta.1988
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.1997
- Hanafi. *Reformasi Sistem pertanggung jawaban pidana*. Jurnal Hukum. Jakarta.1999
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.2005
- Muladi dan Priyanto, dwijanto. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Prenada Media Group, Jakarta.2010
- Mulyadi, Lilik. *Hal-Hal Mendasar Dalam Penjatuhan pemidanaan oleh hakim*. Sinar Grafika cipta. Jakarta.2010
- P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan ketiga. Citra Aditya Bakti, Bandung.1997
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
- S. Ananda. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.2009
- Saleh,Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. cetakan ketiga. Aksara Baru. Jakarta.2009

- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam, Citra Aditya, Bandung.2006
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hokum*, Semarang.2008
- Sudarto. *Hukum Pidana I-Badan Penyedia Bahan-Bahan Kuliah*. FH UNDIP. Semarang.1988
- Wahid, Abdul. *Modus-modus Kejahatan Modern*, Sinar Grafika. Bandung.1993
- Wiyanto, Roni . *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*.Bandung.C.V.Mandar.2012
- Yuniar,Tati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Agung Media Mulia. Bandung.2009

Perundang-undangan

- Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- Pasal 55 RUU KUHP Tahun 2011 (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Pasal 50 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman



RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi yang berjudul “PENGUNAAN CEK DAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN Tka.)

” adalah **Muhammad Azhar Akbar**. Anak Ke Sembilan dari Sembilan bersaudara ialah putra kandung dari pasangan Bapak Mustamin dan Ibu Fahisah yang lahir di Toloi-Toli pada tanggal 29 September 1994. Penulis mulai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 7 Komba Desa Komba Kec. Larompong Kab. Luwu pada tahun 2001 selesai pada tahun 2007. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Larompong dan tamat pada tahun 2010 kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Larompong selesai pada tahun 2013 dan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum dan menyelesaikan studinya pada tahun 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R